



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

AKSI DAMAI - Aksi damai penolakan pembangunan TPS 3R Karangmiri di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul oleh warga masyarakat Jagalan dan sekitarnya, Rabu (12/6).



Warga Tolak TPS 3R Karangmiri

BANTUL, TRIBUN - Masyarakat Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul menggelar aksi damai, Rabu (12/6) sore. Lewat aksi tersebut, mereka menolak pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Karangmiri di lokasi setempat. Perwakilan warga, Andri mengatakan,

● ke halaman 11

Warga Tolak

● Sambungan Hal 1

phaknya menolak pembangunan TPS 3R Karangmiri karena dampak jangka panjangnya untuk penduduk. Menurutnya, warga sudah terganggu dengan arema menyengat ketika TPS 3R itu baru satu hari diuji coba. "Dari situ, warga berinisiatif menggelar aksi damai ini. Kami tidak ada tujuan untuk menjadikan bentrokan antara warga dengan pemerintah," katanya.

Ia menegaskan, warga ingin TPS 3R Karangmiri ditutup total kemudian dibangun ruang terbuka hijau atau fasilitas olahraga untuk penduduk. Menurutnya, lokasi tersebut tidak layak dijadikan tempat pengolahan sampah karena berdekatan dengan permukiman dan kebun sungai.

"Itu semua sudah ada aturannya. Pemerintah harus melakukan kajian dulu, baru diaplikasikan. Apalagi, warga baru tahu di situ dibangun TPS setelah terbangun 50 persen," cetusnya.

Menurutnya, perwakilan Pemkot Yogyakarta baru menemui masyarakat, setelah muncul aksi penolakan lewat pemasangan banner beberapa waktu lalu. Hanya saja dalam pertemuan tersebut, meski judulnya sosialisasi, pemerintah sama sekali tidak menawarkan solusi untuk penduduk.

"Di situ tidak ada sosialisasi, karena yang ada malah terkesan pemaksaan. Warga di situ harus menerima dan harus setuju," ungkapnya.

Tidak mencemari
Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto menyebut, polemik persampahan merupakan permasalahan bersama. Dirinya pun berharap peran serta dari masyarakat, untuk ambil bagian dalam penyelesaian problem yang sudah berkepanjangan itu.

"Itu kan masalah kita bersama. *Lha nek kono demo, kene yo demo, terus sampahne meh didokok ngendit?* (Kalau di sana demo, di sini demo, terus sampah mau diletakkan dimana) Semua sedang ditata oleh (pemerintah) kota, sedang dikondisi-

kan," tegasnya.

"Tapi sejauh ini kan belum. Alat dan gedung untuk pengolahan terpadu saja belum selesai, meski proses sudah berjalan," urai Sugeng.

Sugeng memastikan, operasional TPS 3R Karangmiri tidak akan mencemari lingkungan. Pasalnya, sampah yang diboyong menuju tempat pengelolaan yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Bantul tersebut, bakal diolah habis tanpa meninggalkan gunung dan limbah.

"Insyaallah (tidak mencemari lingkungan), karena di situ, ekstremnya, sampah tidak akan sampai turun dari truk. Artinya begini, truk bawa (sampah) diolah, kan masuk conveyor, kemudian dihancurkan jadi bubuk dan langsung keluar dari lokasi," urai Sugeng.

Sugeng menyampaikan, bahwa dalam pembangunan TPS 3R pihaknya mengedepankan aspek lingkungan. Bukan tanpa alasan, karena ketiga tempat pengolahan yang direalisasikan Pemkot Yogyakarta, seluruhnya dibangun tidak jauh dari permukiman penduduk.

Selain TPS 3R Karangmiri, Pemkot Yogyakarta juga menyelesaikan dua tempat pengolahan sampah lainnya, di Nittikan dan Kranon dengan kuota masing-masing 70 ton dan 30 ton per sampah hari. TPS 3R Karangmiri ditarget mulai beroperasi pada akhir Juni dengan kuota 30 ton per hari.

Ketiga TPS 3R pun dilengkapi dengan mesin pengolah sampah menjadi produk RDF (*Refuse Derived Fuel*) yang digunakan sebagai alternatif sumber energi oleh industri, yang dalam prosesnya terdapat pembakaran menggunakan bahan bakar fosil seperti batubara.

Sehingga, muatan dari pengolahan sampah, baik di Nittikan, Kranon, dan Karangmiri adalah nol residu, alias tidak ada sampah yang tak terkelola. "Bahasa kami, (sampah) tidak akan turun dari truk. Kalau ada airnya, sedikit itu lumrah, tapi dengan EM4 dan lain-lain ada solusinya," tandas Sugeng.

Musyawarah
Sugeng Purwanto mengatakan bahwa proses konsolidasi masih berlangsung. Pihaknya menyebut, aksi

tersebut bukan sepenuhnya penolakan, namun hanya kecurigaan warga terhadap solusi dari Pemkot Yogyakarta.

"Bukan penolakan, konsolidasi ulang. Pada dasarnya memang masalah sampah itu masalah sosial. Meski sudah dikondisikan kayak apapun, pasti masih ada ketidakpuasan," tandasnya.

Dalam menyelesaikan polemik ini, pemerintah memilih jalan musyawarah, sampai kedua belah pihak benar-benar menemukan kata muafakat. Sugeng pun memastikan, Pemkot Yogyakarta tidak akan menutup mata dan telinganya, terhadap keluhan-keluhan yang muncul dari warga.

"Kita *wong Yogyakarta* (Yogya) to, segala permasalahan ya *dirampungke* (diselesaikan) dengan musyawarah. Kami mengarah pada penyelesaian secara musyawarah," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono mengajak semua pihak untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pihaknya menyadari, menggeser kebiasaan membuang sampah menjadi mengolahnya memang tidak mudah.

"Proses ini memang pembelajaran bersama. Kita tidak pengalaman mengolah sampah, pengalamannya kita adalah membuang sampah. Nah sekarang dari membuang menjadi mengolah pastinya akan ribut," jelasnya.

Beny Suharsono menegaskan bahwa Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, dan Pemkab Bantul berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sampah ini dengan cepat dan tepat. Beny juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah.

"Plan B Plan C semuanya harus jalan, kalau tidak kan repot. Tau-tau nanti dimana ada timbunan sampah. Kalau soal kecepatan mari kita lakukan, contoh dari pagi sampai siang di (TPS 3R) bisa ditambah lagi tenaganya," ujarnya.

Serampangan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DIY kembali menyoroti penanganan sampah di Kota Yogyakarta, khususnya menyusul peno-

lakan warga terhadap Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Karangmiri.

Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, Dimas R. Perdana menilai, Pemkot Yogyakarta masih terlihat serampangan dalam menghadirkan solusi sampah dan penanganannya. Salah satunya soal legalitas TPS 3R di kawasan perkotaan.

"TPS3R Karangmiri ini terletak di wilayah Bantul, namun asetnya milik Kota Yogyakarta. Prinsipnya, Pemkot Yogyakarta terlihat terburu-buru menyelesaikan masalah sampah tanpa mempertimbangkan legalitas dan dampaknya terhadap masyarakat," ujar Dimas, Rabu (12/6).

Dimas mencontohkan keluhan warga Jagalan terkait bau yang ditimbulkan oleh TPS3R Karangmiri. "Ini perlu dicek ulang. Artinya, Pemkot Yogyakarta belum memiliki rencana aksi yang jelas untuk pengelolaan sampah, dan hanya bertindak secara sporadis," tegasnya.

Ia pun mendorong Pemkot Yogyakarta untuk menyusun rencana aksi yang lebih terencana dan strategis. "Kami harap ada rencana aksi yang bisa terlihat progresnya, terlihat jelas jangka menengah dan panjangnya, bukan yang serampangan seperti ini," ujarnya.

Dimas turut mengkritik pendekatan Pemkot Yogyakarta yang hanya fokus pada penanganan sampah di tengah dan hilir. "Persoalan sampah sebenarnya ada di sumbernya, yaitu dari kebiasaan masyarakat membuang sampah," katanya.

Ia pun menyarankan agar Pemkot Yogyakarta mendeklarasikan "Jogja Darurat Sampah". "Masyarakat lalu difasilitasi pemilihan, dibuatkan upaya pengelolaan sampah di hulu, sambil member-sihkan sampah di tengah dan hilir," paparnya.

Dimas yakin bahwa dengan menyelesaikan masalah sampah di hulu, maka beban di tengah dan hilir akan berkurang. "Kalau hanya fokus di tengah dan hilir, ini tidak akan pernah tuntas. Di hulu juga harus diselesaikan," pungkasnya. (**aka/han**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005